



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 12 Agustus 2016

Halaman: 21

Usaha Mikro Didorong Urus Perizinan

• YULIANINGSIH

Pengurusan izin usaha mikro bisa dilakukan di kecamatan.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendorong para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengurus perizinan. Fasilitas pembuatan izin usaha mikro ini ditujukan untuk membantu legalitas pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Kota Yogyakarta.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkop) Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto, pemberian izin usaha mikro ini sudah dimulai sejak 2015. Namun, kata dia, pelaksanaannya mengalami sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya terkait keberadaan fasilitator di kecamatan. Inilah yang membuat program tersebut sempat terhenti. "Tahun ini kita lanjutkan lagi untuk izin usaha mikro," kata dia, di sela-sela acara pemberian izin usaha mikro di Kecamatan Mergansan, Kota Yogyakarta, Kamis (11/8).

Tri Karyadi menjelaskan, pengurusan

izin usaha mikro ini mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 8/2016 terkait pelimpahan kewenangan ke kecamatan. Dengan ketentuan tersebut, permohonan pembuatan izin usaha mikro kini bisa diurus di kecamatan masing-masing. Ia berharap, adanya ketentuan baru yang memberikan kemudahan ini mampu mendorong pelaku usaha mikro untuk mulai mengurus izin. Meski demikian, ia mengingatkan, usaha yang dijalankan ini tidak melanggar syarat yang sudah ditetapkan. Di antaranya, kata dia, usaha tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan data Disperindagkop, hingga kini jumlah usaha mikro yang sudah memiliki izin tercatat sebanyak 870 usaha. "Izin usaha yang diberikan bisa berlaku selamanya, asalkan tidak berubah jenis usahanya, klasifikasinya, dan tidak menimbulkan dampak ke lingkungan," ujar Tri Karyadi.

Kecamatan Mergansan terpilih menjadi *pilot project* atau proyek percontohan pemberian izin usaha mikro. Pasalnya, wilayah tersebut dinilai memiliki banyak komunitas usaha mikro dan mampu memberikan pendampingan yang baik kepada para pelaku usaha mikro. Mengacu data Disperindagkop Kota Yogyakarta, di Kecamatan Mergansan sudah ada seratus

orang dengan berbagai usaha, seperti kuliner, yang telah mengurus izin.

Pemberian izin usaha mikro di Kecamatan Mergansan itu dihadiri langsung Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Ia memberikan izin usaha mikro secara simbolis kepada pelaku usaha. Saat itu, ia menjelaskan, pemberian izin usaha mikro ini merupakan implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 8/2016. Pengurusan izin ini, kata dia, dilakukan agar usaha menjadi legal. "Dengan begitu, pengusaha pun menjalani usahanya dengan tenang, bahkan bisa mendapat fasilitas dari pemerintah," kata dia.

Setelah berizin, Haryadi pun mengharapkan, pelaku usaha mikro bisa terus mengembangkan usahanya. Sehingga, diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Harapannya pengusaha yang sudah memiliki izin usaha mikro bisa menjalankan usahanya dengan tertib. Jangan karena sudah memiliki izin, lalu berjualan di tempat yang dilarang," ujar dia.

Menurut Kepala Disperindagkop Kota Yogyakarta Lucy Irawati, sekarang ini di wilayahnya terdapat sekitar 22 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah atau sekitar 60 unit usaha di setiap rukun warga. Dengan adanya kemudahan pengurusan izin usaha mikro di tingkat kecamatan, ia menargetkan, hingga 2017 ada 500 pe-

laku usaha yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Desa Prima

Sementara itu, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun depan menargetkan sudah terbentuk 70 Desa Prima atau "Perempuan Indonesia Maju Mandiri". Sekretaris BPPM DIY Carolina Radiastuty menjelaskan, pada 2009, proyek percontohan Desa Prima ini hanya ada satu, yakni di Gondokusuman. Pemerintah DIY lalu mengembangkannya dan kini sudah ada 60 Desa Prima.

Menurut Carolina, anggota Desa Prima ini 50 persennya sudah mem-

punyai usaha dan sisanya yang kondisinya miskin. BPPM memberikan dana stimulan untuk setiap Desa Prima ini rata-rata Rp 37 juta. Syarat Desa Prima ini ialah sumber daya alam. Sehingga, masing-masing desa mempunyai usaha sesuai sumber daya yang ada. Seperti di Godean yang banyak bambu, maka usahanya anyaman bambu. Di Kulonprogo ada yang usaha gula dan batik. Satu yang menjadi kendala adalah terkait pemasarannya. "Karena itu, kami fasilitasi untuk pemasaran dengan mengikuti pameran pembangunan, dan ada pameran khusus untuk produk perempuan," kata dia, kemarin.

■ neni ridanirani edis ifran fitrat

Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Mergansan			

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005